

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang bergerak pada bidang perencanaan sebagai penunjang tugas pemerintah dalam merencanakan penyusunan anggaran dan perencanaan pada daerah . Sebagai badan yang bergerak dalam bidang perencanaan, BAPPEDA juga melakukan pengawasan terhadap badan pemerintahan yang lainnya apakah setiap instansi telah melaksanakan semua kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap masyarakat.

Dasar hukum pendirian BAPPEDA yaitu: Keputusan Presiden (Keppres) No.27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilatarbelakangi karena adanya pertimbangan untuk dapat meningkatkan kesamaan pembangunan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, sehingga pertimbangan dapat lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.

Perencanaan merupakan cara untuk menentukan suatu keputusan utama ekonomi tentang apa dan berapa banyak, bagaimana, bila, dan di mana agar bisa diproduksi serta buat siapa akan dialokasikan,atas dasar pengamatan menyeluruh terhadap sistem perekonomian sebagai satu kesatuan (Diksion, 1992).

Di dalam perencanaan pembangunan hal yang tak kalah penting adalah tersedianya anggaran agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Perencanaan dan anggaran merupakan dua hal yang saling berhubungan dalam proses

pembangunan. Di mana perencanaan tanpa adanya anggaran maka tidak akan mungkin bisa terlaksana dan sebaliknya walaupun anggaran tersedia, tetapi tanpa perencanaan maka anggaran yang ada tersebut tidak akan bisa dipakai secara maksimal atau dalam penggunaannya tidak akan jelas arah dan tujuannya sehingga nilai anggaran yang ada itu bisa dikatakan tidak efektif (Pustaka.net, 2013).

Ada beberapa dokumen yang dihasilkan untuk melakukan kegiatan dalam menyusun dan merencanakan kegiatan dalam suatu daerah yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dokumen yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan. RKPD ini harus dibuat setiap tahun karena harus disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah, serta kemampuan dana pada tahun bersangkutan. Dengan adanya perencanaan dan penganggaran sesuai dengan RKPD, maka pemerintah dapat melaksanakan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah .

Pentingnya perencanaan dalam pendidikan dikarenakan anggaran pendidikan yang sangat besar dan anggaran yang digunakan harus efektif dan tepat sasaran, sehingga perencanaan pada sektor pendidikan dapat dilakukan agar terwujudnya

perencanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1), setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah juga menjadi salah satu cita-cita nasional karena pendidikan merupakan tiang dalam membentuk kesejahteraan hidup guna agar dapat lebih meningkatkan sumber daya manusia.

Perencanaan pendidikan menuntut dan mengantisipasi agar perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, peran pemerintah sangat diperlukan, sebab permasalahan mengenai pendidikan masih sangat sering terjadi. Seperti yang kita lihat, di negara kita masih belum mendapatkan pendidikan yang layak dan ini sangat berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia serta anggaran-anggaran dana dalam pendidikan itu masih belum berjalan dengan lancar.

Di era reformasi sekarang, persaingan terhadap dunia kerja begitu ketat. Perusahaan atau instansi tidak hanya menampung calon kerja yang mempunyai pengetahuan teori saja hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam dunia pendidikan, terutama pada peningkatan kualitas, fasilitas dan kemajuan terhadap pendidikan. Demikian pula untuk Pemerintah Kota Padang agar dapat berperan meningkatkan perencanaan dan penganggaran untuk pengembangan pembangunan pada sektor pendidikan yang dapat memenuhi keinginan masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan pendidikan direncanakan agar lebih dapat meningkatkan derajat pendidikan secara optimal sehingga dapat

mempengaruhi indikator kesejahteraan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dituangkan dalam visi pembangunan pendidikan Kota Padang yaitu mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, dan berdaya asing. Pada setiap indikator pembangunan pendidikan, diusahakan untuk ditampilkan data dan informasi yang menjawab visi dan misi serta berbagai data dan informasi lainnya.

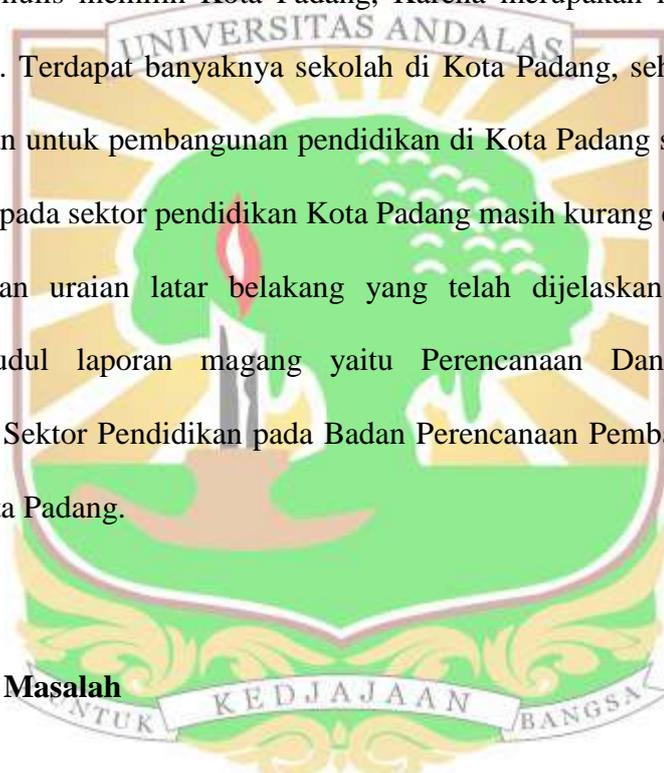
Alasan penulis memilih Kota Padang, Karena merupakan ibukota Provinsi Sumatra Barat. Terdapat banyaknya sekolah di Kota Padang, sehingga anggaran yang digunakan untuk pembangunan pendidikan di Kota Padang sangat besar dan pembangunan pada sektor pendidikan Kota Padang masih kurang efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis mengambil judul laporan magang yaitu Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Sektor Pendidikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan beberapa masalah seperti :

1. Bagaimanakah perencanaan dan penganggaran pada sektor pendidikan?
2. Program dan kegiatan apa saja pemerintah Kota Padang lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik?

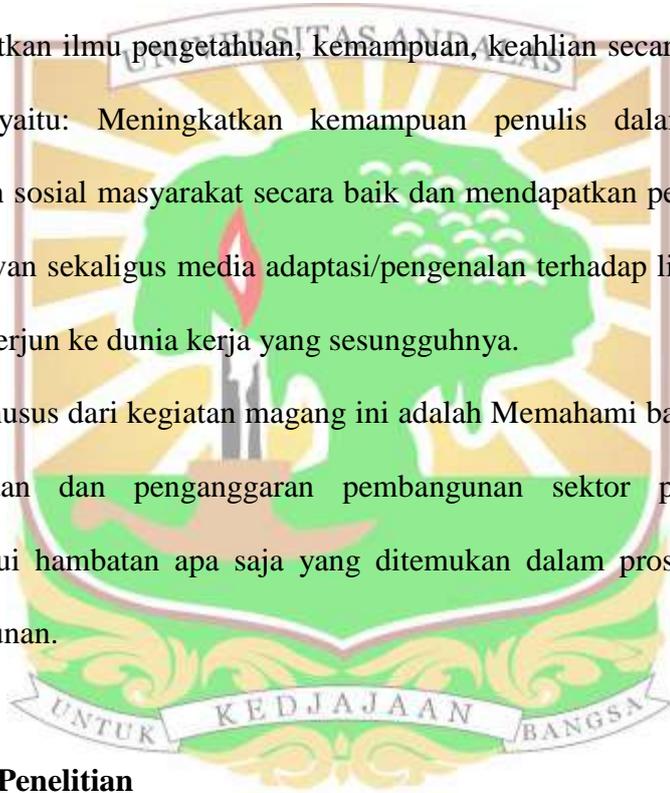


3. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam proses perencanaan pembangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam kegiatan magang ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, adapun tujuan itu yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan umum dari kegiatan magang ini adalah agar penulis dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, kemampuan, keahlian secara *hardskill* atau *softskill* yaitu: Meningkatkan kemampuan penulis dalam menghadapi kehidupan sosial masyarakat secara baik dan mendapatkan pengalaman kerja yang relevan sekaligus media adaptasi/pengenalan terhadap lingkungan kerja sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Tujuan khusus dari kegiatan magang ini adalah Memahami bagaimana proses perencanaan dan penganggaran pembangunan sektor pendidikan dan mengetahui hambatan apa saja yang ditemukan dalam proses perencanaan pembangunan.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama kegiatan perkuliahan agar dapat memperdalam wawasan serta pengetahuan penulis terhadap perencanaan dan pembangunan Pemerintah Kota Padang.

2. Bagi Pemerintah Kota Padang, hasil tugas akhir ini diharapkan dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terutama bagi perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan ke depannya.
3. Bagi pembaca, tugas akhir diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk tugas sejenis.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan metode dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

1.5.1 Sumber Data

Penulis mendapatkan sumber data dari dua cara yaitu data yang diperoleh wawancara dilakukan dengan pegawai Bappeda terkait mengenai prosedur penyusunan dan penetapan RKPD dan dengan melakukan pengamatan langsung pada dokumen RKPD yang terdapat di Bappeda Kota Padang pada Sekretariat Sub Bagian Program. Selanjutnya data diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan penulisan laporan ini sebagai landasan teori. Data sekunder bertujuan untuk mendukung data primer dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan pokok dari perumusan masalah.

1.5.2 Objek Penelitian

Kegiatan magang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang yang berlangsung selama 40 hari kerja atau lebih kurang dua bulan kalender, dengan jam kerja menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Penulis berharap dapat ditempatkan pada bagian yang sesuai dengan judul laporan magang dan dapat bersosialisasi dengan para pegawai di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Padang. Dengan pelaksanaan kegiatan magang ini, diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu, dan pengalaman penulis.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

a. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penulis melakukan penelitian serta mengamati secara langsung di Bappeda Kota Padang, menggunakan metode wawancara kepada pegawai terkait.

b. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penulis melakukan penelitian pada buku-buku yang ada berkaitan dengan judul tugas akhir agar dapat lebih melengkapi dan menyempurnakan tugas akhir penulis.

c. Metode Analisa

Metode analisa yang digunakan dalam penulisan laporan magang ini adalah penulis menganalisa sumber-sumber data yang didapat dari kondisi lapangan dengan fakta yang diperoleh.

1.6 Sistematika Pembuatan Laporan

Bab I: Pendahuluan

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan kegiatan magang, manfaat pelaksanaan magang, metode pengumpulan data, serta sistematika pembuatan laporan.

Bab II: Landasan Teori

Menguraikan pembahasan yang berhubungan dengan perencanaan serta penganggaran pembangunan sektor pendidikan

Bab III: Gambaran Umum

Berisikan mengenai gambaran umum BAPPEDA Kota Padang yang mencakup visi dan misi, sasaran, serta susunan struktur organisasinya. Gambaran umum kualitas pendidikan Kota Padang.

Bab IV: Pembahasan

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sektor Pendidikan Pada Bappeda Kota Padang

Mengemukakan bagaimana proses perencanaan dan penganggaran pembangunan sektor pendidikan pada Bappeda Kota Padang dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Bab V: Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran-saran yang didasarkan pada pemahaman teori hasil penelitian yang didapat serta membandingkan dengan apa yang telah diterapkan oleh Bappeda Kota Padang

